

HEWAN KURBAN HARUS DILENGKAPI SKKH

Stok Kurang, Sleman Tambah Pasokan dari Luar Daerah

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini kembali menegaskan, hewan kurban yang akan dipotong untuk Idul Adha 1443 H harus dipastikan dalam keadaan sehat dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku. Mengingat data per 19 Juni, jumlah kasus PMK yang telah terkonfirmasi yakni 26 ekor. Sehingga Pemkab Sleman terus mengoptimalkan dan memobilisasi personel kesehatan hewan untuk mengatasi wabah PMK.

"Secara umum perilaku penanganan sama seperti virus Covid-19, sudah ada gugus tugas (PMK) di masing-masing kapawon sampai kalurahan," ungkap Bupati kepada wartawan, Rabu (22/6), terkait hasil rapat Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sleman. Pokok pembahasan utama dalam rapat ini adalah koordinasi terkait persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1443 H serta

penanganan virus PMK di Sleman.

Bupati juga mengimbau penjual dan peternak hewan kurban untuk memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai tanda hewan tersebut layak dikonsumsi, atau sehat dan sesuai syariat agama. "Untuk memberikan ketenangan untuk warga di tengah melonjaknya virus PMK, setiap hewan kurban yang aman harus memiliki SKKH dan wajib



KR-Istimewa

Bupati Kustini dan Wabup Danang Maharsa saat memberi pengarahan pada rapat Forkopimda.

kurban di Sleman untuk sapi sebanyak 8.268 ekor. Hingga saat ini sudah terpenuhi sekitar 4.260 ekor atau 51 persen dan masih kekurangan 4.008 ekor. Sedangkan untuk kambing diperkirakan kebutuhan mencapai 2.529 ekor

dengan ketersediaan saat ini 2.156 ekor atau sudah 85 persen, yang artinya kekurangan kambing mencapai 373 ekor. Sedangkan untuk domba dari kebutuhan 7.082 ekor, ketersediaan tersedia 6.029 ekor atau 85 persen dan masih membutuhkan sekitar 1.053 ekor.

"Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pemkab Sleman akan menambah pasokan hewan kurban dari luar daerah. Namun hewan yang masuk harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang sudah ditentukan. Semua hewan yang masuk juga harus dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan (puskesmas). Jika ditemukan ada hewan yang tidak sehat, wajib dipisahkan dari ternak yang sehat. Persyaratan ketat ini juga berlaku bagi pedagang yang akan mengeluarkan ternak dari

Kabupaten Sleman ke luar daerah," tandas Bupati.

Sementara Wakil Bupati Danang Maharsa akan menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pemilihan dan Penyebaran Hewan Kurban untukantisipasi PMK bersamaan dengan pembentukan Gugus Tugas Pengendalian PMK. "PMK di Indonesia sudah menyebar di 18 provinsi sehingga PMK menjadi wabah nasional. Oleh karena itu, dengan pemantauan, penanganan, pengendalian serta pencegahan oleh Gugus Tugas nantinya bisa membuat masyarakat merasa aman jelang Idul Adha," jelasnya.

Danang juga memastikan pasar hewan di Sleman tidak akan ditutup demi menjaga perekonomian masyarakat tetap berjalan namun masih dengan pemantauan untuk menghindari penyebaran PMK. **(Has)-f**

SUMARTININGSIH RAIH HONDA MOBILIO

Simpedes BRI Sleman 5 Besar se-Kanwil Yogya



KR-Istimewa

Kabag Mikro BRI Kanwil Yogyakarta Novan Erianto simbolis menyerahkan grand prize undian Simpedes kepada Kepala BRI Unit Mlati Rina Setiana.

SLEMAN (KR) - Era pandemi Covid-19 yang mulai melandai, turut mendorong animo masyarakat untuk menabung di bank, khususnya BRI Kantor Cabang Sleman. Posisi tabungan Simpedes di BRI Cabang Sleman hingga pertengahan Juni 2022 masuk 5 besar tertinggi se-Kanwil Yogyakarta. Dengan

demikian, layanan yang diberikan BRI bermanfaat untuk masyarakat, sehingga animo menabung di Simpedes semakin besar.

Hal itu diungkapkan Pemimpin Cabang (Pimca) BRI Sleman Yuwanda Rahman diwakili Manajer Pemasaran (MP) Mikro BRI Sleman Siswanto pada Panen Hadiah Simpedes (PHS) Perio-

de 2 2021, Rabu (22/6) di Resto Tekiyo Sleman. Pada pengundian itu, nasabah BRI Unit Mlati V Sumartiningih memenangkan grand prize mobil Honda Mobilio tipe S. Sebelumnya, juga telah diundi pemenang 2 unit motor Yamaha WR 155, 3 unit motor Yamaha All X-Ride New, 3 sepeda Stratos Polygon dan 24 unit motor Yamaha Mio M3. Acara itu juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Instagram.

Lebih lanjut dijelaskan, pada Januari 2022 mikro Kanca BRI Sleman mendapatkan reward spesial dari BRI Kanwil Yogyakarta sebagai peringkat 1 peraih kredit UMKM dari Desember 2021. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab BRI atas tabungan Simpedes disalurkan kembali untuk kepentingan UMKM. Dikatakan, selama 2 ta-

hun pandemi Covid-19 BRI memberikan relaksasi kepada nasabah UMKM yang kesulitan bayar pokok dan bunganya. Fasilitas restrukturisasi kredit ini, berupa keringanan bisa mengangsur pinjaman sesuai kemampuan. Hal menggembirakan, dalam waktu tiga bulan terakhir, nasabah UMKM BRI Sleman sudah mulai normal, tetapi belum 100%. Usaha sudah menggeliat, namun karena modal terpakai sebagai imbas pandemi Covid-19, sehingga mengajukan kredit tambahan atau pinjaman baru, berupa KUR maupun KUPedes.

"Sampai saat ini relaksasi masih berjalan, karena tidak memungkir masih ada usaha yang belum normal. Inilah andil yang diberikan BRI untuk bangsa dan negara. Dana yang dihimpun disalurkan terutama untuk UMKM," paparnya. **(Ben)-f**

BAWASLU SLEMAN DAN PPDI KERJA SAMA

Pemilu 2019 Sisakan Persoalan bagi Disabilitas

SLEMAN (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman mengadakan rapat koordinasi. Kegiatan itu untuk membahas problematika disabilitas di Pemilu. Mengingat pada Pemilu 2019 lalu, masih banyak menyisakan persoalan bagi kaum disabilitas.

Ketua PPDI Sleman Sukanto mengatakan, disabilitas punya banyak pengalaman dalam pemilu. Di antaranya seperti masih adanya TPS yang belum aksesibel, petugas KPPS yang terkesan cuek dan tidak ramah saat pencoblosan, petugas yang tidak membuat skala prioritas bagi kaum disabilitas dan lainnya.

"Pemilu 2019 masih menyisakan persoalan. Semoga rapat koordinasi ini bisa mengurai dan merekomen-



KR-Istimewa

Bawaslu dan PPDI Sleman melakukan kerja sama dalam sosialisasi dan penguasaan Pemilu.

dasikan perbaikan-perbaikan ke depan", kata Sukanto, Selasa (21/6).

Rapat koordinasi ini terdiri dari sahabat disabilitas unsur organisasi PPDI di 17 kecamatan, wakil dari Pertuni, HWDI, dan Gerkatin. Acara tersebut diakhiri penandatanganan naskah kerja sama Bawaslu Sleman dan PPDI Kabupaten Sleman yang berisikan tentang

giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif guna mensukseskan Pemilu 2024.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu DIY M Amir Nahiruddin mengaku telah mencatat beberapa persoalan untuk didiskusikan dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini KPU sebagai pelaksana teknis. Banyak persoalan di saat

pemilu tersebut harus dicari jalan keluarnya.

"Sebenarnya undang-undang dan peraturan lainnya sudah mawadahi solusinya. Tapi kadang pelaksana di lapangan belum begitu paham, entah karena belum dibimtek, acuh tak acuh dengan penyandang disabilitas. Bahkan tidak melakukan prosedur yang seharusnya, seperti PPDP tidak mendata dengan menanyakan jenis disabilitasnya saat pendataan," kata Amir.

Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa menambahkan, rapat koordinasi ini untuk mawadahi segala permasalahan. Selain itu juga untuk penguatan pemahaman kepemiluan bagi sahabat disabilitas. "Selanjutnya seluruh masalah kita catat, bahas dan akan direkomendasikan kepada lembaga terkait," terang-nya. **(Sni)-f**

Bank BPD DIY Serahkan Mobil Layanan Adminduk



KR-Riyana Ekawati

Santoso Rohmad menyerahkan secara simbolis bantuan mobil keliling kepada Bupati Kustini.

GODEAN (KR) - Untuk mengoptimalkan layanan dan mendukung pencatatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sleman. Bank BPD DIY menyerahkan bantuan mobil keliling dan alat perekaman KTP elektronik sebesar Rp 357,6 juta kepada Pemkab Sleman. Penyerahan Bantuan CSR Bank BPD ini diserahkan oleh Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad kepada Bupati Sleman Kustini di Kalurahan Sidoarum Godean, Rabu (22/6).

Menurut Santoso Rohmad, keberadaan mobil keliling diharapkan bisa mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan itu pihaknya sepakat CSR Bank BPD DIY disalurkan untuk

membantu Disdukcapil Sleman untuk melayani dokumen kependudukan masyarakat. Mengingat di Sleman capaian Kartu Identitas Anak (KIA) sudah melebihi target 70 persen.

Adanya mobil keliling tersebut diharapkn dapat memacu capaian hingga 100 persen. Apabila seluruh dokumen kependudukan terpenuhi, masyarakat bisa mengakses kebutuhan mereka untuk perbankan. Begitu juga sebaliknya, perbankan juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. "Bank BPD DIY mendorong capaian dokumen-dokumen kependudukan bisa mencapai 100 persen agar masyarakat bisa terpenuhi," kata Santoso Rohmad.

Ditambahkan, dokumen



Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Sleman

VISI Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode 2021 - 2026 adalah Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong". Cerdas yang dimaksud dalam visi tersebut adalah Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment.

Salah satu indikator dalam hal tersebut adalah adanya responsivitas Pemkab Sleman terhadap aduan dari masyarakat. Kabupaten Sleman memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan pengaduan publik, yaitu Perbup Sleman No.19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Perbup Sleman No. 106 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal. Melihat pentingnya hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman No. 52 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024.

Pemkab Sleman percaya bahwa aduan-aduan dari masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk perbaikan pelayanan menuju perbaikan pembangunan Kabupaten Sleman secara menyeluruh. Untuk itu Pemkab Sleman berkomitmen membangun dan memperbaiki kanal-kanal aduan yang ada. Tahun 2014 Pemkab Sleman memiliki 5 kanal aduan, seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini Pemkab Sleman telah memiliki setidaknya 13 kanal aduan. Dengan berbagai pilihan kanal saluran aduan diharapkan masyarakat bisa memberikan masukan terkait pelaksanaan pelayanan atau



memerlukan penyelesaian dengan anggaran yang cukup besar dan tidak dapat dibiayai dengan anggaran tahun berjalan, maka aduan tersebut dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan anggaran tahun-tahun berikutnya. Dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia serta bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP), Pemkab Sleman mendapatkan apresiasi dan penghargaan untuk kategori instansi pemerintah 'Outstanding Achievement'. Prestasi ini cukup membanggakan, mengingat hanya 2 Kabupaten di Indonesia yang berhasil masuk dalam 6 jajaran peserta terbaik Kategori Outstanding Achievement, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Demak.

Saya berharap, penghargaan yang diperoleh Pemkab Sleman dapat memacu dan memotivasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman agar terus meningkatkan kualitas sehingga pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan lebih baik, dikarenakan aduan atau masukan dari masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mari Sesarengan mBangun Sleman. **(Has)-f**

pembangunan yang dilakukan Pemkab Sleman.

Terkait aduan-aduan yang masuk dari masyarakat, Pemkab Sleman berusaha untuk menyelesaikan dengan tuntas. Aduan-aduan yang bersifat teknis sektoral akan diselesaikan oleh masing-masing perangkat daerah pengampu, sedangkan aduan yang bersifat lintas sektoral akan dikordinasikan antarperangkat daerah sehingga muncul sinergi penyelesaian. Pada prinsipnya semua aduan akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun jika memang permasalahan yang diajukan

SLEMAN (KR) - Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), Dr Ircham MT membuka kegiatan Prarapat Kerja (Praraker) ITNY Tahun 2022 di Gedung Rektorat ITNY, Babarsari, Skeman, Rabu (22/6). Raker ITNY tahun ini mengambil tema Mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ITNY melalui Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka/ MBKM di era Revolusi Industri 4.0i. Kegiatan ini diikuti oleh para wakil rektor, para dekan dan wakil Dekan, Kaprodi, Ka Lembaga, Kabi, serta Kabag.

Ketua Panitia Subardi PhD dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan

Praraker tentang penjelasan pengurusan program kerja tahun 2022. Sementara, penyusunan Program Kerja (Proker) diagendakan pada 23 Juni hingga 6 Juli 2022. Sedangkan pengumpulan Proker tanggal 7 Juli 2022.

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional (YPTN), Ir Supadno, menyampaikan sehubungan dengan harga-harga yang melambung tinggi, namun diharapkan Proker tetap bisa menjaga ketercapaian IKU agar tetap bisa menjaga kualitas institusi.

Rektor ITNY, Dr Ircham, MT menekankan tentang beberapa isu penting dalam Raker ITNY tahun 2022 ini



KR-Istimewa

Praraker ITNY di kampus Babarsari.

yaitu percepatan guru besar, peningkatan kerja sama internasional, peningkatan jenjang dosen dan program internasional bagi mahasiswa. "Selain itu, akan ada unit layanan Bisnis ITNY yang sudah di-

tuangkan dalam surat keputusan rektor, serta akan segera disusun inkubator bisnis yang berada di bawah institusi. Hal ini merupakan capaian dari Indeks Kinerja Tambahan," tu-turnya. **(Jay)-f**